***QUO VADIS* “*OK OCE*”: *COLLABORATIVE GOVERNANCE* SEBUAH SOLUSI**

Ika Sartika

**Abstrak**

Tulisan ini mencoba meneropong sejauh mana pelaksanaan program *OK OCE* sebagai program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta. Metode yang dilakukan adalah penelaahan data sekunder serta survei terhadap para peserta dan pengelola program *OK OCE*. Jumlah wirausaha yang berhasil mendapat perijinan masih jauh dari target. Berbagai hambatan yang teridentifikasi adalah kurangnya motivasi dan kepercayaan calon pengusaha terhadap keberhasilan program ini. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah peserta di setiap tahapan, yang dikenal sebagai Tujuh Pasti Sukses, mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perijinan, pemasaran, pelaporan, dan permodalan. Kesulitan dalam perijinan juga merupakan hambatan yang menyebabkan target belum tercapai. Pelaksanaan program *OK OCE* tidak bisa ditangani jika hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta berbagai pihak atau *stakeholders* yang secara bersama-sama melaksanakan tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*).

**Kata-Kata Kunci**: *Collaborative governance*; Program *OK OCE*; Tujuh Pasti Sukses.

**Abstract**

This paper tries to explore the extent to which the OK OCE program is implemented as a superior program to improve the welfare of the people in DKI Jakarta. The method used was a review of secondary data and a survey of participants and managers of the OK OCE program. The number of entrepreneurs who managed to get permits is still far from the target. Various obstacles identified were the lack of motivation and trust of prospective entrepreneurs in the success of this program. This can be seen from the decrease in the number of participants at each stage, known as *Tujuh Pasti Sukses*, starting from registration, training, mentoring, licensing, marketing, reporting, and capital. Difficulties in licensing are also obstacles that have not achieved the target. The implementation of the OK OCE program cannot be handled if it is only done by one or two parties, but requires the participation of various parties or stakeholders who jointly carry out collaborative governance.

**Keywords**: Collaborative governance; OK OCEProgram; *Tujuh Pasti Sukses*.

**PENDAHULUAN**

Jakarta, seperti halnya kota-kota besar lainnya telah lama menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan penduduk mencapai 10,37 juta jiwa pada tahun 2017 (BPS Jakarta, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statisik, jumlah [penduduk DKI Jakarta](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/13/berapa-penduduk-miskin-di-jakarta) pada tahun 2015 mencapai 10,18 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada tahun 2016, dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada tahun 2017. Artinya, selama dua tahun terkahir jumlah penduduk di Ibu Kota bertambah 269 jiwa setiap hari atau 11 orang per jam. Ada pun wilayah dengan populasi terbanyak adalah Jakarta Timur dengan jumlah penduduk mencapai 2,89 juta jiwa, diikuti Jakarta Barat (2,53 juta jiwa) dan Jakarta Selatan (2,23 juta jiwa). Lalu Jakarta Utara (1,78 juta jiwa), Jakarta Pusat (921 ribu jiwa), serta Kabupaten Kepulauan Seribu (24 ribu jiwa), seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sementara rasio perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Jakarta pada tahun lalu mencapai 100,61. Artinya, jumlah penduduk laki-laki di Jakarta lebih banyak dibanding perempuan.



Gambar 1 Jumlah Penduduk di DKI Jakarta (BPS Jakarta, 2017)

Pada hari-hari arus balik lebaran, Jakarta kebanjiran pendatang dari daerah. Menurut perkiraan Pemerintah DKI Jakarta, setelah lebaran penduduk DKI Jakarta bertambah sekitar 250 ribu jiwa baik untuk mencari kehidupan baru di Jakarta, maupun sebagai tempat transit menuju kota-kota lain. Kebanyakan para pendatang hanya berbekal tekad tanpa keterampilan yang memadai. Lapangan pekerjaan di Jakarta yang terbatas diperebutkan dengan ketat. Sehingga tidak mengherankan bila para pendatang ini harus tinggal di kolong jembatan dan gubuk-gubuk liar menjadi pengemis dan gelandangan di jalanan.

Jumlah pengangguran di DKI [Jakarta](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/10/masa-gubernur-ahok-penganguran-jakarta-capai-level-terendah) pada Agustus 2017 mencapai 346.940 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,14 persen dari total angkatan kerja. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Februari 2017 hanya 5,36 persen maupun dari posisi Agustus 2016 sebesar 6,12 persen. Tingkat pengangguran di Ibu Kota tersebut juga jauh di atas TPT nasional, yakni 5,5 persen. Tingkat pengangguran tertinggi di DKI terdapat di Jakarta Timur, yakni mencapai 7,8 persen atau sebanyak 99 ribu jiwa. Diikuti Jakarta Utara sebesar 7,67 persen dengan jumlah penganggur lebih dari 69 ribu jiwa, dan Kepulauan Seribu dengan TPT sebesar 7,33 persen dengan jumlah penganggur sebanyak 66 ribu jiwa. Pengangguran ketiga wilayah tersebut di atas tingkat pengangguran provinsi DKI Jakarta. Jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta pada Agustus 2017 turun sebesar 605.750 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk yang bekerja berkurang 660 ribu jiwa sehigga [pengangguran](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/08/pengangguran-terbesar-ternyata-lulusan-smk) bertambah 54.250 jiwa dibanding Februari 2017. Data Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta (BPS Jakarta, 2017)

Selain masalah pengangguran, masalah kemiskinan di DKI Jakarta juga merupakan persoalan utama. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2017 sebesar 389,69 ribu orang (3,77%). Dibandingkan dengan September 2016 (385,84 ribu orang atau 3,75%), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,85 ribu atau meningkat 0,02 poin. Sedangkan dibandingkan dengan Maret 2016 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 384,30 ribu orang (3,75%), jumlah penduduk miskin meningkat 5,39 ribu atau meningkat 0,02 poin.

Ada tiga alasan utama yang mengharuskan kemiskinan mendapatkan perhatian utama. Pertama, kemiskinan yang ekstrem menghasilkan inefisiensi ekonomi. Jumlah kemiskinan yang tinggi menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit. Lebih lanjut, tingkat tabungan secara keseluruhan dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan marjinal tertinggi ditemukan pada kelas menengah. Kedua, kemiskinan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Ketiga, kemiskinan yang ekstrem dipandang tidak adil. Kemiskinan yang ada disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan struktural bagi kaum miskin untuk mengakses sumber-sumber kekayaan, sedangkan golongan kaya karena faktor keturunan dan aset dengan mudah mendapatkan kekayaan (Permana, 2010).

Oleh karena permasalahan kemiskinan begitu luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan serta membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Mulai tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program *OK OCE* (*One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship*) yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di tiap kecamatan. Selanjutnya program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran di DKI Jakarta, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta.

***QUO VADIS OK OCE*?**

*OK OCE* masuk ke dalam program kerja prioritas untuk menciptakan wirausahawan dan lapangan kerja baru. Program *OK OCE* dibuat untuk pembangunan ekonomi yang berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam RAPBD 2018, Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan dana sebanyak Rp 82 miliar untuk program *OK OCE*. Anggaran sebanyak itu akan dipakai untuk pendampingan anggota *OK OCE* dan pembangunan tempat kumpul kreatif (*coworking space*) di tiap kecamatan (news.detik.com).

Sejak awal digulirkan, program *OK OCE* diharapkan dapat menjadi solusi terhadap tiga masalah yang sering terjadi dalam memberdayakan usaha kecil menengah dan mikro (UMKM). Pertama adalah masalah lahan usaha yang minim. Untuk menjawab masalah itu, program *OKE OCE* mampu menciptakan wirausaha sekaligus membinanya. Kedua masalah pemasaran, yang dapat diselesaikan dengan adanya *OK OCE Mart*, yang akan berpihak kepada masyarakat kecil. Masalah ketiga adalah sulitnya permodalan yang sering dihadapi pengusaha kecil. Solusinya adalah dengan memberikan kredit khusus perempuan tanpa jaminan. Dengan pinjaman modal tanpa jaminan itu, diharapkan akan lahir pengusaha-pengusaha perempuan baru di Jakarta (kompas.com).

Jaminan Pemerintah DKI Jakarta tentang solusi yang ditawarkan melalui program *OK OCE* dalam pelaksanaannya bukan tanpa hambatan. Calon pengusaha yang mendaftar untuk mengikuti program ini berharap bahwa mereka akan diberi modal secukupnya untuk berusaha. Padahal akses terhadap permodalan tetap harus diusahakan sendiri oleh para pengusaha tersebut, pemerintah provinsi hanya memfasilitasi untuk mempertemukan para pengusaha dengan investor atau pemilik modal. Salah satu upaya pemda adalah menjadikan Bank DKI sebagai penyedia modal yang dapat diakses oleh calon pengusaha. Tetapi dalam jangka panjang tentu saja Bank DKI tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan modal seluruh pengusaha yang terus bertambah jumlahnya. Di samping itu, suku bunga bank yang ditetapkan oleh Bank DKI relatif tinggi, yaitu 13% per tahun. Dari aspek permodalan saja, Pemerintah Provinsi DKI memerlukan keterlibatan investor lain.

Di samping permodalan yang dirisaukan oleh calon pengusaha, pemasaran juga merupakan aspek penting yang harus dicari jalan keluarnya. Adanya *OK OCE Mart* yang masih terbatas jumlahnya, belum menjadi solusi untuk masalah pemasaran. Dewasa ini baru ada lima gerai *OK OCE Mart*, dan dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 15 gerai. Tentu saja jumlah *minimarket* ini masih belum memadai untuk menampung produk yang dihasilkan oleh para pengusaha baru di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus merangkul pihak-pihak lain yang dapat mempermudah para pengusaha untuk memasarkan hasil produksinya.

Sejak awal bergulirnya program *OK OCE* banyak pihak yang meragukan bahwa program ini akan mampu menciptakan wirausahawan baru, dan dalam jangka panjang dapat mengurangi jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Untuk meyakinkan berbagai pihak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan program ini sehingga masyarakat sebagai target utama dapat berpartisipasi secara aktif dalam program ini, baik sebagai pengusaha mau pun sebagai investor. Kolaborasi antar pihak-pihak yang berkepentingan diperlukan secara sinergis supaya program ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Pemerintah Provinsi DKI menargetkan dalam satu tahun akan ada 50 sampai 70 pelatihan. Untuk anggotanya dalam satu bulan ditargetkan sebanyak 4 ribu. Per hari ini di tiap kecamatan di Jakarta setidaknya sudah ada 50 anggota *OK OCE*. Program *OK OCE* telah dimulai pada Selasa (5/12/2017). Warga Jakarta bisa ikut pelatihan gratis di kantor kecamatan setiap hari Sabtu. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, ditargetkan muncul wirausahawan baru sebanyak 200.000 orang, jadi sekitar 40.000 orang per tahun (news.detik.com). Untuk mencapai target ini bukanlah hal yang mudah, butuh keseriusan dalam pengelolaan program *OK OCE* di seluruh kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Di samping itu, diperlukan kerjasama dan partisipasi yang optimal dari setiap pemangku kepentingan dalam program *OK OCE*.

Program *OK OCE* dapat dikatakan berhasil jika paling tidak terdapat 44 pusat kegiatan usaha yang tersebar di seluruh DKI Jakarta sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada (mediaindonesia online). Pusat kegiatan usaha tersebar di seluruh kecamatan yang berada di wilayah kabupaten dan kota administrasi yang ada di DKI Jakarta seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota, 2016



Sumber: (BPS Jakarta, 2017)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan daerah yang memiliki luas daerah paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Di samping itu memiliki jumlah kecamatan terbanyak bersamaan dengan Jakarta Selatan, yaitu 10 kecamatan. Data sebelumnya juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk terbanyak juga berada di Kota Administrasi Jakarta Timur. Begitu juga tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di Kota Administrasi Jakarta Timur, bahkan melebihi tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta. Mengingat hal tersebut, maka keberhasilan program *OK OCE* akan dilihat berdasarkan data yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kepala Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi DKI Jakarta, seperti dikutip oleh kompas.com menyatakan: “Ikuti metode Tujuh Pasti Sukses, yang terdiri atas:

1. Pendaftaran (P1),
2. Pelatihan (P2),
3. Pendampingan (P3),
4. Perijinan (P4),
5. Pemasaran (P5),
6. Pelaporan Keuangan (P6), dan
7. Permodalan (P7).

Seseorang dikatakan berhasil menjadi wirausahawan jika dia sudah mendapat ijin usaha, dengan kata lain sudah sampai pada tahap P4 (Perijinan). Sampai saat ini pengusaha baru yang berhasil dijaring, persentasenya masih sangat kecil. Data berikut ini diperoleh dari Suku Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang memperlihatkan jumlah peserta OK OCE di setiap tahap.

Tabel 2 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pendampingan Kewirausahaan Kota Administrasi Jakarta Timur



Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah wirausahawan yang sudah memperoleh perijinan sebanyak 395 orang. Hal ini masih jauh di bawah target, jika kita merujuk pada target Pemerintah DKI Jakarta yang mencanangkan 40.000 orang pengusaha per tahun. Paling tidak terdapat 900 pengusaha di tiap kecamatan. Sehingga untuk Kota Jakarta Timur minimal harus terbentuk 9.000 pengusaha yang siap untuk memasarkan produknya. Merujuk pada data di atas, pencapaian di Jakarta Timur baru 4,4%, sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hasil wawancara dengan calon pengusaha dapat disimpulkan bahwa perijinan merupakan proses tersulit karena berbenturan dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebelum program OK OCE diluncurkan. Banyak lokasi yang diperuntukan untuk jalur hijau sehingga tidak bias dijadikan sarana usaha. Di samping itu perijinan yang sudah diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, dianggap oleh sebagian para pengusaha cukup menyulitkan dan merepotkan. Hal ini disebabkan karena ada tahapan yang harus dilakukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di kelurahan masing-masing yang membuat para calon pengusaha harus menyediakan berbagai persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu persyaratan yang dianggap terlalu banyak, sehingga sulit untuk dipenuhi dengan cepat,

Kriteria keberhasilan lain adalah terbentuknya satu pusat pembinaan kewirausahaan. Di pusat tersebut dibentuk *co-working space* untuk semua pengusaha secara personal dan juga secara komunitas untuk saling bersinergi. Tentu saja ini masih dalam proses penggodokan dengan bantuan berbagai pihak. Masih ada waktu untuk terus memperjuangkan program ini sampai berhasil dan mencapai target yang ditetapkan. Butuh keseriusan pihak-pihak terkait untuk keberhasilan program ini, jangan sampai berhenti di tengah jalan, dan memunculkan pertanyaan: *Quo Vadis OK OCE*?,

***COLLABORATIVE GOVERNANCE*: SEBUAH SOLUSI**

 Menindak lanjuti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program *OK OCE*, tentu saja hal ini tidak bisa ditangani jika hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta berbagai pihak atau *stakeholders* yang secara bersama-sama melaksanakan tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*).

Menurut Ansell dan Gash (2007) tata kelola pemerintahan kolaboratif *(collaborative governance)* adalah cara sebuah pemerintahan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik*.*

Pendapat tersebut didukung dengan *Kirk Emerson et.al.* (2011) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan kolaboratif *(collaborative governance)* sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja.

Penelitian tentang tata kelola pemerintahan kolaboratif sudah banyak dilakukan di berbagai sektor. Penelitian tentang penanganan bencana sudah dilakukan oleh: (Mutiarawati & Sudarmo, 2017), (Widodo, Si, Waskita, & Si, 2015), (Widianingsih, 2013), serta (Lathifah, 2012), sedangkan untuk sektor pariwisata sudah dilakukan oleh (Ngo, Hales, & Lohmann, 2018), (Fairuza, 2017), (Harmawan, Wasiati, & Rohman, 2017), serta (Tresiana & Duadji, 2017). Tidak kalah pentingnya adalah penelitian dalam bidang kesehatan (Ist, 2016). Ranah lain yang juga sudah diteliti adalah tentang pemberdayaan masyarakat desa (Panday, 2018), (Edelenbos, van Meerkerk, & Schenk, 2018), (Solano Lara, Fernández Crispín, & López Téllez, 2018), serta pengembangan ekonomi (Leppek, Bruen, & Schweitzer, 2018), (Li, Dombrowski, & Brady, 2018), (Rachman & Syamsuddin, 2017), (Dewi, 2012). Penelitian tentang tata kelola pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program *OK OCE* dapat dikategorikan ke dalam pengembangan ekonomi. Walaupun sudah beberapa penelitian terkait pengembangan ekonomi, tetapi penelitian ini lebih rinci dan fokus membahas tata kelola pemerintahan tidak hanya kerjasama antar pemangku kepentingan saja.

Ada pun *stakeholders* dalam pelaksanaan program *OK OCE* ialah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Bank DKI, pihak swasta selaku calon investor, serta masyarakat sebagai calon pengusaha. Karena target program *OK OCE* adalah seluruh kecamatan yang ada di seluruh kota administratif dan kabupaten di DKI Jakarta, maka walikota, bupati, suku dinas UMKM, kecamatan, serta kelurahan merupakan *stakeholders* yang harus bekerjasama untuk menyukseskan program *OK OCE* di DKI Jakarta.

Konsep *collaborative governance* sendiri mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerja sama, dan apa inisiatif dari masing-masing institusi (*stakeholders*) dalam menentukan/mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Dalam hal ini siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat melalui tiga aspek. Pertama, inisiatif pasti bermula dari pemain/pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar. Kedua, masing-masing *stakeholders* atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. Ketiga, hubungan di antara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparasi tersebut (*Donahue* dalam Sudarmo, 2011).

Terdapat lima konsep *collaborative governance* yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Konsep pertama dikembangkan oleh *Wildavsky* sebagaimana dikutip *Wanna* yang mengatakan bahwa kolaborasi dan koordinasi melibatkan 6 (enam) dimensi yang berbeda yaitu (1) kerjasama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi dan penyelarasan kegiatan antar sektor, (2) negosiasi yang melibatkan proses dan kesiapan untuk berkompromi membuat kesepakatan, (3) peran pengawasan, pemeriksaan, penarikan secara bersama-sama dan koordinasi secara terpusat, (4) kekuasaan dan pemaksaan (5) komitmen masa depan dan perhatian, perilaku yang prospektif, perencanaan atau persiapan untuk menyelaraskan kegiatan dan (6) membangkitkan motivasi internal serta komitmen pribadi pada kegiatan, keputusan, tujuan organisasi atau strategi pencapaian tujuan (*John Wanna*, 2008).

Konsep kedua menyatakan bahwa *collaborative governance* terdiri atas 5 (lima) komponen yakni *starting condition* yang menjelaskan tentang kekuasaan, sumber daya dan pengetahuan yang tidak simetris antar aktor yang terlibat, latar belakang kerjasama dan konflik yang menggambarkan tingkatan kepercayaan antar aktor serta insentif yang akan didapatkan aktor untuk ikut berkolaborasi.

Konsep ketiga menjelaskan c*ollaborative governance* sebagaimana hasil penelitian *Morse* dan *Stephens* yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) tahapan yakni penilaian *(assessment)*, inisiasi *(initiation)*, deliberasi *(deliberation)* dan implementasi *(implementation)* (*Ricardo S. Morse and John B. Stephens*, 2016).

Konsep keempat dikemukakan oleh *DeSeve* dalam bukunya *Creating public value using managed networks*, menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam *governance*, delapan item tersebut antara lain:

1. *Networked structure* (struktur jaringan); menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. *Milward* dan *Provan* (dalam Sudarmo, 2011) mengkategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk:
2. *Self Governance* *Model*; tidak terdapat entitas administratif namun demikian masing-masing *stakeholders* berpartisipasi dalam *network* dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa semua *stakeholders* ikut berpartisipasi aktif, memiliki komitmen serta mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisasi sehingga sulit mencapai konsesnsus. *Stakeholders* yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan komunikasi dan pemantauan secara intensif.
3. *Lead Organization Model*; memiliki entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota network atau penyedia pelayanan. Sifatnya lebih tersentralisasi. Kelebihannya bisa efisien dan arah jaringan jelas. Kelemahannya, terdapat dominasi dari pimpinan organisasi dan kurangnya komitmen dari anggota yang tergabung. Anggota dalam *network* sebaiknya cukup banyak agar lebih optimal. Jaringan tidak boleh membentuk hirarki, struktur jaringan harus bersifat organis dan sedatar mungkin, semuanya setara baik dalam hal hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama.
4. *Network Administrative Organization* (*NAO*) *Model* ini memiliki entitas administratif secara tegas untuk mengelola jaringan, bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji.
5. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan); mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif.
6. *Trust among the participants* (adanya saling percaya di antara pelaku/peserta); didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, yakni keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.
7. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola); meliputi:
8. *Boundary dan exclusivity*; menegaskan siapa yang termasuk anggota dan bukan termasuk anggota dalam jaringan/kolaborasi.
9. *Rules* (aturan-aturan); menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama). Ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
10. *Self determination*; yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana *network* atau kolaborasi akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk menjalankannya.
11. *Network management*; berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Kemudian tersedia sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan dan tersedia sumber finansial yang memadai dan berkesinambungan.
12. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan); yakni tersedianya standar (ukuran-ukuran), ketentuan prosedur yang jelas dan diterima secara luas.
13. *Distributive accountability*/*responsibility* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas); yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan, artinya berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan pula.
14. *Information sharing* (berbagi informasi); yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak.
15. *Access to resources* (akses sumber daya); yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia, dan sumberdaya lainnya yang diperlukan.

Konsep kelima yang merupakan konsep terakhir dikemukakan oleh *Emerson*, *Nabatchi* dan *Balogh* yang mengembangkan konsep *collaborative governance* dalam bentuk 3 (tiga) lingkaran yang saling berkaitan dengan didorong oleh sejumlah faktor untuk memberikan dampak yang akan diadaptasi pada masing-masing lingkaran. Sisi paling luar merupakan sistem dimana proses kolaborasi terjadi, lingkaran kedua yang berada di tengah adalah *collaboration governance regime* (*CGR*) dan lingkaran terakhir paling dalam merupakan *collaboration dynamics* (dinamika kolaborasi).

Setelah membandingkan kelima konsep *collaborative governance* di atas, selanjutnya yang dirasa sesuai sebagai solusi dalam pelaksanaan program *OK OCE* di Provinsi DKI Jakarta adalah konsep keempat yang dikembangkan oleh *Deseve*. Alasan utamanya adalah kedelapan dimensi yang ada sangat sesuai mencerminkan keterlibatan stakeholders dalam program *OK OCE*. Di samping itu, konsep ini dapat mengelaborasi tata pemerintahan kolaboratif dalam pelaksanaan program *OK OCE* untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, analisis akan difokuskan terhadap delapan dimensi *collaborative governance* versi *Deseve*.

1. **Jenis struktur jaringan**

Jenis struktur jaringan yang sesuai dalam pelaksanaan program *OK OCE* adalah: *Self Governance* *Model*; yaitu masing-masing *stakeholders* berpartisipasi dalam *network* dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa semua *stakeholders* ikut berpartisipasi aktif, memiliki komitmen serta mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisasi sehingga sulit mencapai konsesnsus. *Stakeholders* yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan komunikasi dan pemantauan secara intensif. Dalam kasus ini sebaiknya pemerintah bertindak sebagai inisiator program yang mengawal melalui berbagai peraturan yang tegas tetapi memberi kemudahan untuk berjalannya program *OK OCE*. Secara bertahap manajemen diserahkan kepada para pengusaha setelah terbentuk pusat kewirausahaan di tiap kecamatan.

1. **Komitmen terhadap tujuan**

Kolaborasi yang terjalin selama ini sudah mendasar pada tujuan, visi dan misi yang sama. Terkait dengan komitmen dari masing-masing stakeholders, diperoleh data bahwa semua stakeholders mempunyai komitmen penuh guna mencapai tujuan bersama. Terbukti dengan adanya rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Apalagi program *OK OCE* adalah program unggulan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengentaskan kemiskinan di masa yang akan datang. Komitmen pemerintah terbukti dengan mencantumkan pendanaan program *OK OCE* dalam APBD tahun 2018. Komitmen pemerintah harus terus dibuktikan tidak hanya dalam pendanaan, tetapi juga dalam kemudahan perijinan sehingga penciptaan wirausaha baru dapat mencapai target yang diharapkan. Di samping itu pengawalan terhadap jalannya program *OK OCE* harus terus dilakukan secara berjenjang.

1. **Kepercayaan di antara para partisipan**

Kepercayaan bahwa program OK OCE akan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang lanjut mengikuti pelatihan mengalami penurunan sekitar 8%, bahkan peserta yang mengikuti pelatihan di setiap tahap semakin menurun cukup drastis, yaitu sekitar 52%. Penurunan jumlah peserta terjadi di setiap tahap, sehingga peserta yang berhasil menjadi pengusaha dan mendapat perijinan belum mencapai target. Penurunan ini disebabkan banyak faktor pastinya, tetapi yang paling terlihat adalah motivasi dan kepercayaan bahwa program ini akan berhasil masih lemah. Dibutuhkan upaya yang cukup kuat dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi calon pengusaha baru.

1. **Kejelasan dalam tata kelola**

Adanya tujuh tahap yang harus dilewati oleh setiap peserta menunjukkan bahwa tata kelola sudah sangat jelas. Calon pengusaha harus mengikuti setiap tahapan dengan jelas, sehingga dapat dibedakan anggota dan yang bukan anggota *OK OCE*. Kejelasan tata kelola juga terlihat dari peran masing-masing *stakeholders* dalam pelaksanaan program *OK OCE*. Mulai dari Dinas dan Suku Dinas UMKM, kecamatan melalui bidang ekonomi dan pembangunan, kelurahan dan PTSP sebagai unit yang mengeluarkan ijin sudah sangat jelas perannya dan diatur dalam peraturan formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Semua tinggal disosialisasikan kepada calon pengusaha yang tergabung dalam program *OK OCE*.

1. **Akses terhadap otoritas**

Dalam kolaborasi ini, semua *stakeholders* sudah memahami bagaimana alur prosedurnya dengan jelas, juga mengetahui tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Semua sudah diatur dengan jelas, termasuk prosedur untuk memperoleh ijin usaha melalui PTSP kelurahan masing-masing. Yang perlu ditingkatkan adalah pendampingan terhadap calon pengusaha untuk mengurus berbagai keperluan usaha baru. Hal ini akan terasa ringan jika sudah terbentuk pusat kewirausahaan di setiap kecamatan seuai target Pemerintah DKI Jakarta.

1. **Pembagian akuntabilitas/responsibilitas**

Pembagian peran dan tanggung jawab sudah jelas sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Demikian juga pelaporan selalu dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Data perkembangan peserta di setiap tahapan merupakan salah satu bukti adanya pertanggungjawaban yang transparan di setiap tahap kegiatan. Demikian juga laporan keuangan yang dihabiskan dalam pelaksanaan program OK OCE sudah dilakukan secara transparan. Yang perlu dilakukan adalah menularkan praktek akuntabilitas dan responsibiltas kepada para pengusaha, sehingga mereka mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

1. **Berbagi informasi**

Berbagi informasi benar-benar dilakukan antar *stakeholders*. Semua *stakeholders* saling mengisi dan melengkapi informasi dan data satu sama lain. Semua proses pelaksanaan program kegiatan bisa diakses oleh semua *stakeholders*. Masing-masing *stakeholders* menyatakan adanya kepercayaan terkait informasi yang diberikan oleh *stakeholders* lainnya dan mereka juga saling membantu. Akses terhadap informasi akan semakin mudah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Melalui media sosial berbagi informasi menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Yang perlu dilakukan adalah tetap konsisten membagi informasi ke semua pihak, termasuk saat pendaftaran program *OK OCE*. Dalam tahap ini terlihat penggunaan website masih nol, artinya informasi belum sampai kepada calon peserta. Berbagi informasi juga sangat penting dalam tahap pemasaran dengan sistem *online*. Cara pemasaran seperti ini akan lebih besar jangkauannya dengan biaya yang murah. Para pengusaha perlu dilatih secara khusus untuk memanfaatkan media sosial untu memasarkan produk masing-masing.

1. **Akses terhadap sumber daya**

Program OK OCE adalah program unggulan Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dukungan sumber daya akan terus diupayakan oleh pemerintah. Sumber daya di sini meliputi keuangan, manusia, serta akses. Dukungan pemerintah sangat dipentingkan terutama dalam tahap pemasaran dan permodalan. Diperlukan kerjasama yang baik dengan investor lain untuk mempercepat terbentuknya pusat kewirausahaan di setiap kecamatan. Peran komunitas yang kuat dalam permodalan perlu didekati dan diajak kolaborasi demi suksesnya program *OK OCE*.

**PENUTUP**

Setelah satu tahun program *OK OCE* berjalan, dalam realisasinya masih banyak hambatan dan belum mencapai target yang diharapkan. Jumlah wirausaha yang berhasil mendapat perijinan masih jauh dari target. Berbagai hambatan yang teridentifikasi adalah kurangnya motivasi dan kepercayaan calon pengusaha terhadap keberhasilan program ini. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah peserta di setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perijinan, pemasaran, pelaporan, dan permodalan. Beberapa peraturan pendukung, terutama terkait perijinan, perlu penyesuaian supaya program *OK OCE* dapat berjalan sesuai harapan.

*Collaborative governance* menjadi salah satu alternatif solusi dalam pelaksanaan program OK OCE, yaitu terbentuknya satu pusat kewirausahaan di setiap kecamatan. Konsep *collaborative governance* yang ditawarkan terdiri atas delapan dimensi, yaitu: struktur jaringan yang memungkinkan partisipasi aktif para peserta; komitmen pemerintah yang memberi peluang terciptanya wirausaha baru; kepercayaan peserta harus diperkuat; sosialisasi berbagai peraturan kepada para peserta; pendampingan berkesinambungan dalam berbagai tahapan; menjaga dan meningkatkan akuntabilitas terus menerus; berbagi informasi antar *stakeholders*; serta dukungan sumber daya dari pemerintah. Adopsi konsep *collaborative governance* diharapkan dapat mempercepat terbentuknya satu pusat kewirausahaan di setiap kecamatan sesuai target Pemerintah DKI Jakarta.

**DAFTAR PUSTAKA**

BPS Jakarta. (2017). Jakarta in figures 2017, 667.

Deseve, Edward. 2007, *Creating public value using managed networks. In R.S. Morse, T.F. Buss C.M. Kinghorn. Transforming public leadership for the 21st century (hal.203-220).* Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Jhon Wanna, 2008. *Collaborative Governance, A new era of public policy in Australia?, Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and Outcome, edited by Janine O’Flynn and John Wanna ANU Pres, Australia*, (hal.3)

Dewi, R. T. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo), 1–141.

Chris Ansell and Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administation Research and Theory, (hal. 543-571) [www.jpart.oxfordjournals.org](http://www.jpart.oxfordjournals.org) diunduh tanggal 19 Mei 2018.

Emerson, Kirk et.al. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory.JPART 22: 1-29

Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi ). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, *5*, 1–13.

Harmawan, B. N., Wasiati, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival (Collaborative Governance in Local Culture Values Development Program Through Banyuwangi Ethno Carnival). *E-SOSPOL*, *IV*, 50–55.

<https://news.detik.com/read/2018/01/24/061214/3830250/10/>

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/13/pemberdayaan-masyarakat-wirausaha-baru-digelar-di-rptra-akasia>.

<http://www.mediaindonesia.com/megapolitan>

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/02/08/ada-syaratnya-untuk-sukses-melalui-program-ok-oce>.

Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya), Tesis, Universitas Airlangga Surabaya.

Ist, M. M. (2016). Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, *4*(April), 1–9.

Junaidi. (2016). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang, Tesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau.

Kurniasih, D. dkk. (2017). *Collaborative Governance Dalam* Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas, Tesis, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Lathifah, F. (2012). KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER, 1–123.

Leppek, J., Bruen, J., & Schweitzer, J. (2018). Resilient Community and Economic Development through Collaborative Innovation Networks, 1–9.

Li, H., Dombrowski, L., & Brady, E. (2018). Working toward Empowering a Community : How Immigrant - Focused Nonprofit Organizations Use Twitter during Political Conflicts, 335–346.

Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, *1*(2), 48–62.

Ngo, T., Hales, R., & Lohmann, G. (2018). Collaborative marketing for the sustainable development of community-based tourism enterprises: a reconciliation of diverse perspectives. *Current Issues in Tourism*, *9582*, 1–18. https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1446919

Panday, P. (2018). Making innovations work: local government–NGO partnership and collaborative governance in rural Bangladesh. *Development in Practice*, *28*(1), 125–137. <https://doi.org/10.1080/09614524.2018.1401588>

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Permana, E. (2010). Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoranmas Depok), Tesis, tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Rachman, M. A., & Syamsuddin. (2017). Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Govermental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal, *1*, 135–145.

Solano Lara, C., Fernández Crispín, A., & López Téllez, M. C. (2018). Participatory rural appraisal as an educational tool to empower sustainable community processes. *Journal of Cleaner Production*, *172*, 4254–4262. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.072>

Sudarmo, 2009, Elemen-Elemen *Collaborative Leadership* dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektivitas *Collaborative Governance*, Jurnal *Spirit Publik*.Vol.5, No.2, hlm: 117-132,ISSN 1907-0489.

Thompson, Perry and Miller. 2007. Conceptualizing and Measuring Collaboration. Jurnal of Public Administration Research and Theory Advance Access published December 1, 2007 in Partnering with the Senior’s Sectors”. Local Government. 38 (2). 161 - 181.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). KOLABORATIF PENGELOLAAN PARIWISATA TELUK KILUAN (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism), 77–84.

Widianingsih, I. (2013). In Search of Collaborative Policy Practice at Local Level: The Case of Safe School Againts Disaster in West Nusa Tenggara, Indonesia, 1–19.

Widodo, A. S., Si, S. I. P. M., Waskita, J., & Si, M. (2015). MANAJEMEN RESIKO BENCANA MELALUI KERJASAMA ANTAR DAERAH ( STUDI TENTANG MANAJEMEN RESIKO BENCANA GUNUNG SLAMET ), 57–65.